



## Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022

### 1. PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam penyusunan laporan ini meliputi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan sebagai informasi kinerja pemerintah kepada masyarakat

#### A. Kondisi Geografis

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 249 Rukun Warga, dan 1.371 Rukun Tetangga dengan luas wilayah administratif sekitar 37,358 km<sup>2</sup> atau sekitar 3.736 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon

Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

Sebelah Timur : Laut Jawa

#### B. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 22 (dua puluh dua) Kelurahan dengan Jumlah penduduk pada Tahun 2022 346.438 Jiwa dengan Jumlah Laki-laki 173.756 Jiwa dan Perempuan 172.682 Jiwa.

### 2. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Format laporan kinerja makro meliputi:

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja 2022 (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75.25%	75.89%	0.85%
2	Angka Kemiskinan	10.03%	9.82%	-2.094
3	Angka Pengangguran	10.53%	8.42%	2.11%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.04%	5.01%	1.97
5	Pendapatan Per Kapita	72.75%	78.00%	5.25%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.421	0.48	14.04%



### 3. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,12%	Dinas Pendidikan	
2	Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,73%	Dinas Pendidikan	
3	Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	127,22%	Dinas Pendidikan	
4	Urusan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang &nbsp;berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	91,28%	Dinas Pendidikan	
5	Urusan Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	503,97%	Dinas Kesehatan	
6	Urusan Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
7	Urusan Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,41%	Dinas Kesehatan	
8	Urusan Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,99%	Dinas Kesehatan	
9	Urusan Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,52%	Dinas Kesehatan	
10	Urusan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,92%	Dinas Kesehatan	

11	Urusan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,25%	Dinas Kesehatan	
12	Urusan Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49,69%	Dinas Kesehatan	
13	Urusan Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,50%	Dinas Kesehatan	
14	Urusan Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,68%	Dinas Kesehatan	
15	Urusan Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,93%	Dinas Kesehatan	
16	Urusan Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	136,91%	Dinas Kesehatan	
17	Urusan Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
18	Urusan Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	74,11%	Dinas Kesehatan	
19	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	76,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	



20	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	63,86%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
21	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	13,13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
22	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
23	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,06%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
24	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
25	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	93,27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
26	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	105,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

27	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
28	Urusan Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	20%	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	
29	Urusan Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	
30	Urusan Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100%	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	
31	Urusan Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,5%	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	
32	Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,60%	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	
33	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	64,28%	Satpol PP	
34	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP	
35	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3000	KPBD	
36	Ketentraman, Ketertiban	Jumlah warga negara yang memperoleh	8300	KPBD	

	Umum dan Perlindungan Masyarakat	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
37	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	KPBD	
38	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	KPBD	
39	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,92 detik	Dinas Pemdam Kebakaran & Penyelamatan	
40	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial	
41	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial	
42	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Disnaker	
43	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	47,75%	Disnaker	
44	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	54,37%	Disnaker	

45	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	33,57%	Disnaker	
46	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	48,57%	Disnaker	
47	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	14,30%	DP3APPKB	
48	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03%	DP3APPKB	
49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,17%	DP3APPKB	
50	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	250,77%	DKP3	
51	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUTR	
52	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DPUTR	

53	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	DPUTR	
54	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	DPUTR	
55	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	DPUTR	
56	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	DPUTR	
57	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	55,7%	DLH	
58	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	82,92%	DLH	
59	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan & terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35,71%	DLH	
60	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,81%	DISDUKCAPIL	
61	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	85,65%	DISDUKCAPIL	
62	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	85,09%	DISDUKCAPIL	



63	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	56,25%	DISDUKCAPIL	
64	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	SETDA	
65	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	SETDA	
66	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,38	DP3APPKB	
67	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64,59%	DP31PPKB	
68	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,39%	DP31PPKB	
69	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	100%	DISHUB	
70	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	3,27%	DISHUB	
71	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DKIS	
72	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DKIS	
73	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	98.29%	DKIS	



74	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	49,62%	DKUKMPP	
75	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	15,60%	DKUKMPP	
76	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	443,43%	DPMPTSP	
77	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	30,90%	DISPORA	
78	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5.84%	DISPORA	
79	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	12	DISPORA	
80	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DKIS	
81	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DKIS	
82	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	67,90%	DKIS	
83	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	72.414	DISBUDPAR	
84	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	DISPUSIP	
85	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	40,59%	DISPUSIP	
86	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	48,08%	DISPUSIP	

		nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009			
87	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	47,92%	DISPUSIP	
89	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	27,84%	DISBUDPAR	
90	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	283,61%	DISBUDPAR	
91	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	29,38%	DISBUDPAR	
92	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,875	DISBUDPAR	
93	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,05	DISBUDPAR	
94	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	549,95%	DKP3	
95	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	0		
96	Kehutanan		0	BUP	
97	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	BUP	

98	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	98,28%	DKUMPKM	
99	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	24,99%	DKUMPKM	
100	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	84,25%	DKUMPKM	
101	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	7,87%	DKUMPKM	
102	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	DKUMPKM	
103	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10,11%	DKUMPKM	
104	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DKUMPKM	



105	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	DKUMPKM	
106	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	DKUMPKM	
107	Transmigrasi		0	BUP	

#### 4. Hasil EPPD dan Laporan Keuangan

##### a. Opini atas Laporan Keuangan Pemda

No.	Tahun	Predikat	Keterangan
1	2018	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
2	2019	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
3	2020	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
4	2021	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP
5	2022	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP

##### b. Ringkasan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022

No	SKPD	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN	381,001,932,755.00	371,982,759,025.00	-9,019,173,730.00	97.63
2	DINAS KESEHATAN	575,338,631,188.00	515,819,867,461.00	-59,518,763,727.00	89.66
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	103,229,954,449.00	71,385,459,884.00	-31,844,494,565.00	69.15
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16,330,314,723.00	14,535,173,247.00	-1,795,141,476.00	89.01



5	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	14,493,596,354.00	13,759,974,022.00	-733,622,332.00	94.94
6	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	9,780,429,224.00	9,691,489,455.00	-88,939,769.00	99.09
7	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	4,496,228,723.00	4,057,055,746.00	-439,172,977.00	90.23
8	<b>DINAS SOSIAL</b>	10,381,245,772.00	9,917,903,420.00	-463,342,352.00	95.54
9	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>	6,387,259,112.00	6,019,048,293.00	-368,210,819.00	94.24
10	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	16,584,562,341.00	15,824,337,212.00	-760,225,129.00	95.42
11	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	38,971,698,786.00	37,025,204,192.00	-1,946,494,594.00	95.01
12	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	9,101,329,330.00	8,407,752,950.00	-693,576,380.00	92.38
13	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	13,312,940,044.00	10,846,192,241.00	-2,466,747,803.00	81.47
14	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	29,174,985,225.00	27,081,092,708.00	-2,093,892,517.00	92.82
15	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>	18,652,064,288.00	17,370,422,743.00	-1,281,641,545.00	93.13
16	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	12,825,674,360.00	11,888,588,369.00	-937,085,991.00	92.69
17	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	8,535,123,614.00	7,934,201,863.00	-600,921,751.00	92.96



18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	19,291,793,713.00	19,061,934,569.00	-229,859,144.00	98.81
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9,186,412,412.00	8,157,644,563.00	-1,028,767,849.00	88.80
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,903,938,834.00	8,631,272,921.00	-272,665,913.00	96.94
21	SEKRETARIAT DAERAH	52,005,293,612.00	47,386,081,698.00	-4,619,211,914.00	91.12
22	SEKRETARIAT DPRD	65,088,560,791.00	58,065,501,211.00	-7,023,059,580.00	89.21
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13,201,257,803.00	12,151,993,798.00	-1,049,264,005.00	92.05
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	39,969,691,314.00	31,590,564,818.00	-8,379,126,496.00	79.04
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13,081,581,238.00	12,360,624,299.00	-720,956,939.00	94.49
26	INSPEKTORAT DAERAH	13,276,306,675.00	12,400,117,443.00	-876,189,232.00	93.40
27	KECAMATAN KEJAKSAN	10,613,199,280.00	9,944,169,636.00	-669,029,644.00	93.70
28	KECAMATAN KESAMBI	14,004,540,574.00	13,506,408,593.00	-498,131,981.00	96.44
29	KECAMATAN HARJAMUKTI	15,155,723,420.00	14,744,105,644.00	-411,617,776.00	97.28
30	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	11,829,980,867.00	11,394,154,725.00	-435,826,142.00	96.32
31	KECAMATAN PEKALIPAN	10,322,867,324.00	9,786,947,242.00	-535,920,082.00	94.81
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12,030,900,230.00	11,060,269,746.00	-970,630,484.00	91.93
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1,576,560,018,375.00</b>	<b>1,433,788,313,737.00</b>	<b>-142,771,704,638.00</b>	<b>90.94</b>



## 5. Inovasi dan Prestasi Daerah

No	Inovasi	Prestasi
1.	<b>Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, dan Unggul Dalam Segala Bidang</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kontes Curhat</b> (Konseling tentang segala hal media offline/online, dalam rangka memfasilitasi konseling masyarakat Kota Cirebon yang bertujuan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat).</li> <li>2. <b>Wadul Bae</b> (Warga Peduli Bocah Lan Emboke penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara terpadu baik dari sisi proses hukum pelaku maupun kesehatan korban).</li> <li>3. <b>Panjer Pahala</b> (Pengantaran dan Penjemputan Anak Hebat tercinta dan difabel)</li> <li>4. <b>Kula Eksis</b> (Kelompok warga peduli ekonomi disabilitas)</li> <li>5. <b>Dipandu Sobat</b> (Digital Pemantauan dan Pengaduan Masalah Sosial secara Akurat)</li> <li>6. <b>Cirebon Ngaber</b> (Ngalap Berkah, Penanganan masalah sosial secara Lomprehensif dan Terintegrasi).</li> <li>7. <b>Cirebon Lengko</b> (Sistem Layanan Elektronik Kesehatan Online mempermudah pengelolaan data Kesehatan bagi Masyarakat).</li> <li>8. <b>Pentas Purnama</b> (Pementasan Budaya dan Seni pada setiap Bulan Purnama Untuk Meningkatkan MInat Wisata)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghargaan dari Times Indonesia kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati dengan kategori Special Achievement Tokoh Peduli UMKM.</li> <li>2. Penghargaan dari Baznas Award 2022 kepada Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.</li> <li>3. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kepada Pemerintah Kota Cirebon, atas prestasi sebagai Kota Layak Anak Peringkat Pratama Tahun 2022.</li> <li>4. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih Juara Pertama dalam Agenda Pameran Investasi bertajuk Blitar Jadoel Tata Tentrem Kerto Raharjo Wujudaken Blitar Keren.</li> <li>5. Penghargaan dari BKKBN Kepada Kota Cirebon, sebagai Juara 1 Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Nasional Pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor Tahun 2022.</li> <li>6. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Kepada Kota Cirebon, Harapan I Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kategori Kota Tahun 2022.</li> <li>7. Penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Citebon sebagai Pemenang</li> </ol>





No	Inovasi	Prestasi
		<p>Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.</p> <p>8. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai Capaian Peserta Pelayanan KB lebih dari 100% pada Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA) Rangkaian Hari Keluarga Nasional XXIX Tahun 2022.</p> <p>9. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, atas Posyandu Award Tahun 2022 Kategori Kota.</p> <p>10. Perolehan Emas Cabang Olahraga Bola Basket, Dansa, Bowling, Gulat, Gateball, Muaythai, Panjat Tebing, Selam, Taekwondo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porporov XIV) Jawa Barat 2022.</p> <p>11. Perolehan Emas Cabang Olahraga Angkat Berat pada Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) VI Kabupaten Bekasi 2022.</p> <p>12. Perolehan Emas Cabang Olahraga Angkat Berat dan Atletik pada Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) VI Kabupaten Bekasi 2022.</p> <p>13. Perolehan Emas Cabang Olahraga Basket Beregu Putri pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Nasional (POPWILNAS) Tahun 2022.</p> <p>14. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Kepada Kota Cirebon, sebagai Kota yang telah mengikuti Penilaian Evaluasi Akhir Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS )Tahun 2022.</p> <p>15. Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Kepada Walikota Cirebon, atas peran dan kontribusi serta keseriusan</p>

No	Inovasi	Prestasi
		yang luar biasa dalam program percepatan penurunan Stunting sehingga prevalensi stunting hasil Survei Status Gizi Indonesia ( SSGI ) Tahun 2022 di Kota Cirebon turun sebesar 13,6 % dibandingkan SSGI 2021.
2.	<b>Misi Ke 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>SAMPEAN</b> (Sistem digitalisasi Pengelolaan dan Pengawasan Kehadiran PNS di Lingkungan Pemda Kota Cirebon)</li> <li>2. <b>Cirebon 112</b> (Command Center dan Layanan Kedaruratan yang mengintegrasikan berbagai layanan kedaruratan, kesehatan, trantibum, kebakakaran dalam satu jalur layanan cepat)</li> <li>3. <b>Cirebon Satu Data</b> (Portal Open Data di Kota Cirebon, menyediakan data secara komprehensif untuk berbagai keperluan, baik untuk perencanaan pembangunan daerah maupun penelitian dan lain-lain)</li> <li>4. <b>e-Library</b> (Perpustakaan Digital sebagai penunjang perpustakaan konvensional)</li> <li>5. <b>e-SAKIP</b> (Digitalisasi sistem pelaporan akuntabilitas kinerja)</li> <li>6. <b>Kelakon Pitulas</b> (Percetakan KTP-el bagi penduduk yang baru berusia 17 tahun, dengan syarat penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan, selama 6 (enam) tahun berturut-turut, sejak tahun 2016 sampai 2021.</li> <li>2. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Predikat Nilai “B” atau kategori Baik.</li> <li>3. Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Inovasi Terbaik.</li> <li>4. Penghargaan dari Merdeka.com kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Merdeka Award Kategori Inovasi Digital.</li> <li>5. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif tahun 2022.</li> <li>6. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kategori Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.</li> <li>7. Peringkat III Kategori Pelayanan Pensiun PNS, Nominasi Kategori</li> </ol>



No	Inovasi	Prestasi
	<p>tersebut sudah merekam biometric sebelum berumur 17 tahun)</p> <p>7. <b>Kelakon Ning RW</b> Pelayanan jemput bola perekaman biometric ke RW</p> <p>8. <b>Kelakon Buntel</b> Pelayanan terintegritas surat pindah atau pindah datang dengan Kartu keluarga dan KTP-el</p> <p>9. <b>Kelakon Ditunggoni</b> Pelayanan pencetakan KTP-el yang diselesaikan dalam waktu 3 – 5 menit</p> <p>10. <b>Kelakon Ning Kampus</b> pelayanan perekaman biometric dan pencetakan KTP-el silakukan di lingkungan kampus</p> <p>11. <b>Kelakon Ning Bocah</b> Pelayanan Kartu Identitas Anak melalui lembaga pendidikan formal dan informal untuk anak usia 0 – 17 tahun</p> <p>12. <b>Brojol Aja Klalen</b> Pendaftaran akta kelahiran secara online</p> <p>13. <b>UIS Tamat</b> (uang Insentive Akta Kematian) Insentive atau uang transport sebesar Rp. 50.000,00 yang diberikan kepada pengurus RT/RW yang melaporkan kematian warganya</p> <p>14. <b>Kemat Kakek</b> (Akta Kematian Kartu keluarga dan KTP-el) pelayanan terintegrasi bagi setiap warga yang kematian</p> <p>15. <b>Simadu Kakeku</b> Sistem Terpadu Akta Perkawinan, KTP-el , dan kartu keluarga) pelayanan terintegrasi bagi setiap</p>	<p>Pelayanan Status Kepegawaian, Pemanfaatan CAT BKN, Pelayanan Pegangkatan PNS dari Kantor Regional III BKN Bandung.</p> <p>8. Penghargaan Penilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat “ADMINDUK JUARA” Dengan Predikat Terbaik III pada Kategori Penduduk Kecil Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Barat.</p> <p>9. Penghargaan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” berdasarkan Hasil Penilaian Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022 dengan nilai A. Sebagai Bentuk Penghargaan Atas Komitmen dan Kompetensi Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik.</p>

No	Inovasi	Prestasi
	<p>warga yang mendaftarkan Akta Perkawinan</p> <p><b>16. Padu Enake</b> (Pelayanan Terpadu e-KTP, Kartu keluarga dan Akta Perceraian) pelayanan terintegrasi bagi setiap warga yang mendaftarkan Akta Perceraian</p>	
3.	<b>Misi 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan</b>	
	<p><b>1. Cirebon Kudu Eling</b> (Kolaborasi Penduduk dalam Pengelolaan Lingkungan dalam meningkatkan kualitas lingkungan bertujuan agar Kota Cirebon menjadi <i>liveable city</i>)</p> <p><b>2. Smart Pju</b> (Sistem digitalisasi penerangan lampu jalan, dimana setiap ON atau Lampu Off dapat terdata secara digital by real time)</p>	<p>1. Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup.</p>
4.	<b>Misi 4 Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif</b>	
	<p><b>1. Cirebon 112</b> (Command Center dan Layanan Kedaruratan yang mengintegrasikan berbagai layanan kedaruratan, kesehatan, trantibum, kebakakaran dalam satu jalur layanan cepat)</p> <p><b>2. Sedulur</b> Sistem Pelayanan Terpadu Kelurahan, melalui digitalisasi pelayanan di lingkup kelurahan</p> <p><b>3. Cirebon Matahatiku</b> Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV-Ku, Sistem Pelayanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik</p>	<p>1. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Kepada Kota Cirebon Dengan Predikat Peringkat IV sebagai Kota terbaik dalam Pengelolaan Data Sektoral Bidang Kesbangpol di Jawa Barat Tahun 2022.</p>



No	Inovasi	Prestasi
	dengan mengintegrasikan sistem keamanan CCTV <b>4. ATCS (Area Traffic Control System)</b> (Sistem Kendali Lalu Lintas Kendaraan dengan menyelaraskan waktu Lampu Merah)	

## 6. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dibuat sebagai informasi kepada masyarakat terhadap kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon.

Cirebon, 29 Maret 2023  
WALI KOTA CIREBON



Drs. NASHRUDIN AZIS, S.H.